

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adinugraha, Anggiana G. dkk (eds), *Tata Kelola Perkebunan Sawit di Indonesia (Studi Kasus di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat)*, Forci Development Fakultas Kehutanan IPB, Juli 2018, Bogor,
- Anonim, *Penetapan Kawasan Hutan Menuju Kawasan Hutan Indonesia yang Mantap*, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Jakarta Juli 2017
- Anonim, *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Dalam Kawasan Hutan*, Kementerian ATR/BPN, Jakarta 2015
- Apeldorn, LJ. Van, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Aksara, Jakarta, 1983
- Awang, San Afri, *Dekonstruksi Sosial Forestri: reposisi masyarakat dan keadilan sosial*, BIGRAF Publishing-Yogyakarta, 2004
- Departemen Kehutanan dan BPS, *Identifikasi Desa di Dalam dan di Sekitar Kawasan Hutan 2009*, Departemen Kehutanan dan BPS, Jakarta, 2009
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Forest Watch Indonesia, *Potret Keadaan Hutan Indonesia 2000-2009*, FWI, Bogor, 2011
- Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, 2009
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Edisi ke-VIII, Yogyakarta, 2005
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya (Hukum Tanah Nasional)*, Jilid 1, Djambatan, Bandung, 2005
- Hiariej, Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014

- Iskandar, *Kebijakan Perubahan Kawasan Hutan, dalam Pengelolaan Berkelanjutan*, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung 2011
- Ismail, Nurhasan, *Hukum Agraria dalam Tantangan Perubahan*, Setara Press, Malang, 2018
- Kartodihardjo, Hariadi, *Analisis Kebijakan Pengelolaan SDA (diskursus-politik-aktor-jaringan)*, Sajogyo Intitute, Yayasan Auriga, Rimbawan Muda Indonesia, Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah-IPB, Pusat Studi Agraria-IPB, dan Firdaus Pressindo, Bogor, 2017
- Kartodihardjo. Hariadi, Bramasto Nugroho dan Haryanto R Putro, *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): konsep, peraturan perundangan dan implementasi*, Kementerian Kehutanan (Dirjen Planologi Kehutanan-Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan), Jakarta, 2011
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2008
-, *Pengantar Teori Hukum (terj)*, Nusa Media, Bandung, 2012
- Kementerian Kehutanan, *Statistik Kementerian Kehutanan 2013*, Kementerian Kehutanan, Jakarta, Juli 2014
- Latif, Abdul., Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan Ke-3, Jakarta, 2014
- Mahfud MD, Moh, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999
- Maryudi, Ahmad, *Rejim Politik Kehutanan Internasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005
-, *Metode Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1996
- Mustafa, Bachsan, *Sistem Hukum Indonesia*, Remadja Karya, Bandung, 1984
- Nugroho, Riant, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*, Pustaka Pelajar, Cetakan ke-2, Yogyakarta, 2015

- Nurlinda, Ida, *Penerapan Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Menurut Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Kebijakan Pertanahan Nasional*, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008
- Pamulardi, Bambang, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Peluso, Nancy L, *Hutan Kaya Rakyat Melarat: Penguasaan Sumber Daya dan Perlawanan di Jawa, (terj)*, Konphalindo, Jakarta, 2006
- Peirce, Carol J. dan Doris Capistrano (eds), *Politik Desentralisasi: Hutan, Kekuasaan dan Rakyat (pengalaman di berbagai negara)*, CIFOR-Bogor, 2006
- Purwanto. Agus Budi dan Edi Suparpto, *Hutan Jawa: kontestasi dan kolaborasi*, BP ARuPA-Yogyakarta, 2013
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-VIII, 2014
- Rawl, John, *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, (terj)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Simon, Hasanu, *Hutan Jati dan Kemakmuran (problema dan strategi pemecahannya)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Sirait, Martua T, *Inklusi, Eksklusi dan Perubahan Agraria: redistribusi tanah kawasan hutan di Indonesia*, STPN Pres, Yogyakarta, 2017
- Sumardjono, Maria S.W, dkk. *Kajian Harmonisasi Undang-undang di Bidang SDA dan Lingkungan Hidup (SDA-LH)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan KPK, Jakarta, 2018
- Sumardjono, Maria SW, dkk, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia: antara yang tersurat dan tersirat*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- *Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria*, STPN Press, Yogyakarta, 2018
- *Semangat Konstitusi dan Alokasi yang Adil atas Sumber Daya Alam*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2014

-, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum (materi kuliah)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014
-, “*Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*”, makalah Seminar Metodologi Penelitian bagi Dosen FH UGM, Yogyakarta, 12 April 1989
- Safitri, M.A, *Forest tenure in Indonesia: the socio-legal challenges of securing communities'rights*, Doctoral thesis, Leiden University, 2010
- Utrecht, E, *Hukum Pidana I*, cetakan kedua, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960
- Wahjono, Padmo, *Indonesia Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Wibowo, Eddi, *Penguatan Civil Society melalui Proses Perubahan Kebijakan Publik di Tingkat Lokal (studi kasus munculnya perda PSDHBM di Kabupaten Wonosobo)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2004
- Wulan, Yulia Cahya dkk, *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003*, Center for International Forestry Research, Bogor, 2004
- Zakaria, Yando. dkk, *Perhutanan Sosial: dari Slogan menjadi Program (naskah akademik reformulasi kebijakan perhutanan sosial)*, Sekretariat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, Jakarta, 2018
- Yusmira, Nova, *Politik Hukum Perubahan Kawasan Hutan dalam Upaya Menyelesaikan Perbedaan Peruntukan Ruang di Kawasan Hutan*, Program Studi S2 Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013

Jurnal:

- Agrawal, Arun. dan Elinor Ostrom, “Collective Action, Property Rights, and Decentralization in Resource Use in India and Nepal”, *POLITICS & SOCIETY*, Vol. 29 No. 4, December 2001, Sage Publications
- Arizona, Yance, “Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal konstitusi*, Volume 8, nomor 3, Juni 2011
- Basyar, A. Hakim, “Tap MPR-RI No. IX/MPR-RI/2001: Upaya Meletakkan Reformasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam secara

Komprehensif”, *Majalah Perencanaan Pembangunan* No. 27,
April-Juni 2002

Diantoro, Totok Dwi, “Quo Vadis Hutan Jawa”, dalam *Rekonfigurasi
Pengelolaan Hutan Jawa*, Wacana Jurnal Ilmu Sosial
Transformatif 25/XIII, Insist Press, Yogyakarta, 2011

Hendarto. Kresno Agus, “Perhutanan Sosial dan Peubah-peubah Sosiologi yang
Harus Diperhatikan: sebuah tinjauan teoritis”, *Jurnal Manajemen
Hutan Tropika* Vol. IX No. 1, 2008

Magnar, Kuntana., Inna Junaenah dan Giri Ahmad Taufik, “Tafsir MK atas Pasal
33 UUD 1945: (studi atas putusan MK mengenai judicial review
UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002)”, *Jurnal
Konstitusi*, Volume 7, No. 1, Februari 2010

Maladi, Yanis, “Kajian Hukum Kritis Alih Fungsi Lahan Hutan Berorientasi
Kapitalis”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 1 Januari 2013,
Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto

Muhajir, Mumu, “Satu Tahun Perber 4 Menteri tentang Penyelesaian Penguasaan
Tanah di Dalam Kawasan Hutan: kendala, capaian, dan arah ke
depan”, *Policy Brief* Vol. 02/2015, Epsitema Institute-Jakarta

Nurkhalis, “Teori Konstruksi Paradigma Thomas S. Kuhn”, *Jurnal Ilmiah Islam
Futura*, sumber: [file:///C:/Users/asus%20netbook/Downloads/55-
79-1-PB.pdf](file:///C:/Users/asus%20netbook/Downloads/55-79-1-PB.pdf) diakses pada tanggal 20 Mei 2017

Nurjaya, Nyoman, “Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia,” *Jurnal
Jurisprudence* Vol. 2 No. 1 Maret 2005

Nurcholis, Hanif, “Perkembangan Negara/Administrasi Publik Terkini: teori, riset
dan praktik”, makalah disampaikan di Fisip Universitas Jember, 14
November 2017

Ostrom, Elinor. dan Edella Schlager, “Property-Rights Regimes and Natural
Resources: A Conceptual Analysis”, *Land Economic*, Vol. 68, No.
3 (August., 1992), University of Wisconsin Press

Peluso, Nancy L and Peter Vendergeest, “Genealogis of Political Forests and
Costumary Rights in Indonesia, Malaysia and Thailand”, *The
Journal of Asian Studies*, Vol. 60, No. 3 (Aug., 2001), Association
for Asian Studies

Laporan Penelitian, Makalah, Prosiding:

Anonim, “Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan,”
Prosiding Semiloka (*integrated white paper*), Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta 13 Desember 2012

Djajono, Ali, “Saatnya KPH Bergerak (kembali)”, *AgroIndonesia* 24 Juli 2018,
sumber: <http://agroindonesia.co.id/2018/07/saatnya-kph-bergerak-kembali/> diakses pada tanggal 23 Januari 2019

Fay, Chip dan Martua Sirait, “Kerangka Hukum Negara dalam Mengatur Agraria
dan Kehutanan Indonesia: mempertanyakan sistem ganda atas
pengusahaan tanah”, dalam Anonim, *Tanah Masih di Langit
(penyelesaian masalah penguasaan tanah dan kekayaan alam di
Indonesia yang tak kunjung tuntas di era reformasi)*, Prosiding
Seminar Nasional 11-13 Oktober 2004, Yayasan Kemala-Jakarta

Hendarto, “Perhutanan Sosial dan Peubah-peubah Sosiologi yang Harus Diperhatikan:
sebuah tinjauan teoritis”, *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* Vol. IX No.
1, 2008

Ismail, Nurhasan dkk, “Analisa dan Evaluasi Hukum atas UU No. 18 Tahun 2004
tentang Perkebunan” (laporan akhir), Pusat Perencanaan
Pembangunan Hukum Nasional, BPHN, Jakarta, 2011

Kartodihardjo, Hariadi, “Kertas Posisi RUU SDA”, bahan diskusi oleh Pokja PA-
PSDA, Bappenas dan KLH, Jakarta, 8 Desember 2006

..... “Diskursus dan Kebijakan Institusi-Politik Kawasan Hutan:
menelusuri studi kebijakan dan gerakan sosial SDA di Indonesia”,
Orasi Ilmiah Guru Besar IPB, Bogor, 13 Februari 2016

....., “Titik Kritis Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan
Hutan”, *Opini Warta Online Agroindonesia*, 5 Desember 2017.
Sumber: <http://agroindonesia.co.id/2017/12/titik-kritis-penyelesaian-penguasaan-tanah-dalam-kawasan-hutan-2/> diakses
pada tanggal 20 Juni 2018

Mochtar, Zainal Arifin dkk, “Analisis Komparasi Sifat Mengikat Putusan *Judicial
Review* pada Peradilan Tata Negara (Mahkamah Konstitusi) dan
Peradilan Tata Usaha Negara”, Laporan Penelitian di Fakultas
Hukum UGM, Mei 2007, tidak diterbitkan

Muhajir, Mumu. Dian Yanuardi, dkk. “Pembaruan Penguasaan dan Pengelolaan
Kehutanan (Tenurial Reform) di Tangan KPK”, draf belum
diterbitkan. Sumber: <http://kawalnkb.info/wp->

<content/uploads/2016/06/Evaluasi-GN-PSDA-draft.pdf> diakses
pada tanggal 1 Juni 2019

Nugroho, Yuli Prasetyo, “Perhutanan Sosial”, materi presentasi disampaikan pada seminar yang diselenggarakan oleh Program Magister Hukum Litigasi kerjasama dengan Kementerian LHK, Yogyakarta 26 April 2018

Sembiring, Sembiring, “Konstruksi Hukum Penguasaan Tanah Negara dalam Sistem Hukum Tanah Nasional”, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum FH UGM, 2016

Suhendang, Endang, “Perkembangan Paradigma Kehutanan,” makalah dalam Diskusi *Pengelolaan Hutan Berbasis Ekosistem sebagai Pendekatan untuk Pengelolaan Hutan Indonesia dalam Paradigma Kehutanan Indonesia Baru* (dalam rangka ulang tahun emas Fakultas Kehutanan IPB: 1963-2013), Bogor, Agustus 2013.
Sumber:
<http://fahutan.ipb.ac.id/en/component/attachments/download/62>
diakses pada tanggal 20 Mei 2017

Sumardjono, Maria S.W., “UUPA, Pekerjaan Rumah yang Belum Selesai”, makalah disampaikan dalam “*Pembekalan dan Ujian Kode Etik Profesi bagi Para Calon PPAT*”, diselenggarakan oleh PP IPPAT, Jakarta, 19 September 2012

Safitri, Myrna, “Mencari Perusak Hutan”, Opini Harian Kompas, 12 Maret 2015

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, “Perubahan Kebijakan dalam Pengukuhan Kawasan Hutan”, Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Jakarta 4 September 2014.
Sumber:
http://www.tataruangpertanahan.com/file_peraturan/81620140925164524_240531244-perubahan-kebijakan-dalam-pengukuhan-kawasan-hutan.pdf diakses pada tanggal 17 Juni 2018

Tim Pakar Fakultas Kehutanan UGM, “Pokok-Pokok Pikiran UGM untuk Revisi UU 41/1999”, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “*Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*”, Fakultas Kehutanan UGM, 12 April 2017

Tim Pelaksana Penyelesaian PTKH, “Sosialisasi Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian PTKH”, materi presentasi 2017, tidak dipublikasikan

Wibowo, Agung dkk, “Dari Reformasi Kembali ke Orde Baru: tinjauan kritis Perpres No. 88 Tahun 2017”, Opini Hukum AMAN, Epistema Institute, dan Perkumpulan HuMA Oktober 2017. Sumber: http://epistema.or.id/wp-content/uploads/dlm_uploads/2017/10/Opini_Hukum-Okt_2017.pdf diakses pada tanggal 18 Juni 2018

W, Soeparno, “Menyoal Luas Kawasan Hutan Minimal 30%?”, sumber: https://indonesiana.tempo.co/read/121378/2018/01/05/soeparno_w/menyoal-luas-kawasan-hutan-minimal-30 diakses pada tanggal 5 Januari 2019

Internet:

Anonim, “Naskah Akademik RUU Pertanahan”, dikutip dari sumber <http://bapka.usu.ac.id/peraturan-ректор/category/9-peraturan-lainnya.html?download=60%3Aruu-naskah-akademik-> diakses pada tanggal 15 September 2015

Anonim, “*Penyelesaian Konflik Agraria Wajib jadi Prioritas Jokowi-JK*”. Siaran Pers Komnas HAM, KPA, dan Walhi 9 September 2014. Sumber: <http://www.walhi.or.id/penyelesaian-konflik-agraria-wajib-jadi-prioritas-jokowi-jk.html> diakses pada tanggal 9 Desember 2016.

Anonim, “Data Pelepasan Kawasan Hutan periode Tahun 2004-2016”, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sumber: <http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2017/02/Data-Pelepasan-Kawasan-Hutan.pdf> diakses pada tanggal 18 Juli 2017

Anonim, “UGM Tawarkan Rekomendasi Atasi Polemik Tanaman Sawit di Kawasan Hutan”, Pers Conference Fakultas Kehutanan UGM 19 Oktober 2018. Sumber: <https://ugm.ac.id/id/news/17239-ugm.tawarkan.rekomendasi.atasi.polemik.tanaman.sawit.di.kawasan.hutan> diakses pada tanggal 16 Desember 2018

Anonim, “Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan,” Prosiding Semiloka (*integrated white paper*), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta 13 Desember 2012. Sumber: <http://acch.kpk.go.id/documents/10180/15308/integrated-working-paper-inisiatif-percepatan-pengukuhan-kawasan-hutan.pdf/a5c992d5-22f4-494c-8f9d-492b122f018e> diakses pada tanggal 9 Desember 2016

Anonim, “Sulitnya Merealisasikan Pasal 33 UUD 1945 (‘Jihad Konstitusi’ sebagai salah satu jalan untuk meluruskan UU yang bertentangan dan tidak sesuai dengan prinsip konstitusi)”, hukumonline.com, 11

- Mei 2015. Sumber:
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55505f23aac65/sulitnya-merealisasikan-pasal-33-uud-1945> diakses pada tanggal 20 Desember 2017
- Anonim, Ringkasan Putusan Perkara No. 058,059,060,063/PUU-II/2004 dan No. 008/PUU-III/2005, sumber:
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/litigasi/PUU%2058-59-60-63%202004%2008-2005%20SDA.pdf> diakses 20 Desember 2017
- Anonim, “Seluruh UU Sumber Daya Air Dibatalkan MK”, sumber:
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10634> diakses pada tanggal 20 Desember 2017
- Anonim, “Tarif PNBP Kawasan Hutan Masih Bisa Ditelaah”, Kompas 22 Februari 2008. Sumber:
<https://travel.kompas.com/read/2008/02/22/15285581/tarif.pnbp.kawasan.hutan.masih.bisa.ditelaah> diakses pada tanggal 20 Desember 2017
- Anonim, “Siaran Pers Hasil Kajian KPK tentang Kehutanan”, sumber:
http://jikalahari.or.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=132:siaran-pers--paparan-hasil-kajian-kpk-tentang-kehutanan&catid=37:forest-news&Itemid=132&lang=en diakses pada tanggal 17 Mei 2018
- Anonim, Paparan KPK dalam *Kick Off Meeting* Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia (Koordinasi dan Supervisi atas Pengelolaan Sektor Kehutanan dan Perkebunan di 24 Provinsi), KPK, 17 Februari 2015. Sumber: <https://acch.kpk.go.id/images/ragam/gn-sda/gn-sda-kehutanan/02-150216-PAPARAN-KPK-GN-SDA-HUTBUN.pdf> diakses pada tanggal 17 Mei 2017
- Anonim, “NKB 12 Kementerian dan Lembaga tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan”, 11 Juni 2013, sumber:
<http://www.dkn.or.id/2013/07/11/nkb-12-kementerian-dan-lembaga-tentang-percepatan-pengukuhan-kawasan-hutan-indonesia/> diakses pada tanggal 17 Mei 2018
- Anonim, Naskah Kebijakan DKN terkait NKB 12 Kementerian dan Lembaga, “Penataan Kawasan Hutan bagi Kebangkitan Kehutanan Nasional (Masalah, Kebijakan dan Peran DKN)”, DKN, Jakarta, Cetakan Pertama Oktober 2013. Sumber: http://dkn.or.id/wp-content/uploads/2014/01/Naskah-Kebijakan-12-KL_bahasa.pdf diakses pada tanggal 17 Mei 2018

- Anonim, Evaluasi GNP-SDA 2018, <https://acch.kpk.go.id/id/evaluasi-gnp-sda-2018> diakses pada tanggal 17 Juni 2018
- Anonim, “Rencana Strategis Direktorat Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan 2015-2019”, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan-Kementerian LHK, Desember 2015, hlm. 9-10. Sumber: <http://pktl.menlhk.go.id/asset/action.php?action=openfile&filename=20180109072535.pdf> diakses pada tanggal 17 Juni 2018
- Anonim, “Matriks Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan SDA-Sektor Kehutanan dan Perkebunan 2015-1. Kementerian LHK”, sumber: <https://acch.kpk.go.id/id/gn-sda-kehutanan> diakses pada tanggal 17 Juni 2018
- Anonim, “Implementasi Renaksi NKB 12 K/L Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan”, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Jakarta 17 Maret 2016. Sumber: <https://slideplayer.info/slide/12099058/> diakses pada tanggal 17 Juni 2018
- Kantor Berita Nusantara, “Petani Satumin Dituntut 3 Tahun Penjara”, 27 September 2018. Sumber: <https://kbr.id/nusantara/09-2018/petani-satumin-dituntut-3-tahun-penjara/97467.html> diakses pada tanggal 20 Juni 2019
- Mongabay, “Akhirnya Tiga Petani Soppeng Divonis Bebas”, 28 Maret 2018. Sumber: <https://www.mongabay.co.id/2018/03/28/akhirnya-tiga-petani-soppeng-divonis-bebas-bagaimana-ceritanya/> diakses pada tanggal 20 Juni 2019.
- Ekuatorial.com, “Mekanisme PPH untuk Keadilan Penetapan Hak atas Huta”, 28 Agustus 2014. Sumber: <https://www.ekuatorial.com/id/2014/08/indonesian-mekanisme-pph-untuk-keadilan-penetapan-hak-atas-hutan/#!/map=4847> diakses pada tanggal 17 Juni 2018
- Mongabay.com, “Kementerian Lingkungan Rilis Peta Indikatif Hutan Adat dan Ubah Aturan”, 29 Mei 2019. Sumber: <https://www.mongabay.co.id/2019/05/29/kementerian-lingkungan-rilis-peta-indikatif-hutan-adat-dan-ubah-aturan/> diakses pada 30 Juni 2019

Mongabay, “Izin Kebun Sawit di Buol Bermasalah, Mengapa Pelepasan Kawasan Hutan Tetap Keluar?” 31 Januari 2019. Sumber: <https://www.mongabay.co.id/2019/01/31/izin-kebun-sawit-di-buol-bermasalah-mengapa-pelepasan-kawasan-hutan-tetap-keluar/> diakses pada tanggal 30 Juni 2019

Bisnis.com, “KLHK Sebut Administrasi Izin 9.964ha Kebun Sawit di Buol Sudah Lengkap”, 21 Januari 2019. Sumber: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190121/99/880899/klhk-sebut-administrasi-izin-9.964-ha-kebun-sawit-di-buol-sudah-lengkap> diakses pada tanggal 30 Juni 2019

<http://www.merdeka.com/uang/tahun-lalu-115-ribu-hektar-hutan-perhutani-dalam-sengketa.html> diakses pada tanggal 9 Desember 2016

<http://kbbi.web.id/paradigma>, diakses pada tanggal 20 Mei 2017

<http://www.webster-dictionary.org/definition/Paradigm>, diakses pada tanggal 20 Mei 2017

<https://kbbi.web.id/kawasan> diakses pada tanggal 18 Juni 2017

<http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-kawasan/> diakses pada tanggal 18 Juni 2017

<http://industri.bisnis.com/read/20180523/99/798990/reforma-agraria-977.824-ha-kawasan-hutan-telah-dilepas> diakses pada tanggal 17 Juni 2018

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan:

UUD Negara RI 1945

Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Perppu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan
Hutan

PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan

PP No. 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk
Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang
Berlaku pada Departemen Kehutanan.

PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi
Kawasan Hutan

PP No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

PP No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan PP No. 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan

PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan dan Peruntukan Fungsi
Kawasan Hutan

PP No. 105 Tahun 2015 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2015-2019

Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam
Kawasan Hutan

Keputusan Presiden No. 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di
Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999
tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat
Hukum Adat

Keputusan Menteri Kehutanan No. 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar
Penguahan Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan
Fungsi Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan P.34/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan
Fungsi Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah
Kesatuan Pengelolaan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPH Lindung
(KPHL) dan KPH Produksi (KPHP)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi
dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi

Peraturan Menteri Kehutanan P.50/Menhut-II/2011 tentang Penguahan Kawasan
Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan P.44/Menhut-II/2012 tentang Penguahan Kawasan
Hutan

Surat Edaran Menteri Kehutanan SE.3/Menhut-II/2012 tentang Putusan MK
45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012

Surat Edaran Menteri Kehutanan SE.1/Menhut-II/2013 tentang Putusan
MK35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013

Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
SE.2/Menlhk/Setjen/kum.4/2/2016 tentang Putusan MK 95/PUU-
XII/2014 tanggal 10 Desember 2015

Nota Kesepakatan Aksi Bersama 12 Kementerian/Lembaga (NKB 12 K/L)
tentang Percepatan Penguahan Kawasan Hutan Indonesia

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 220/Menhut-II/2014 tentang Pelimpahan
Wewenang Menteri Kehutanan Kepada Direktur Jenderal

Planologi Kehutanan untuk Atas Nama Menteri Kehutanan
Menandatangani Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan
Kawasan Hutan

Surat Keputusan Menteri LHK No. 180/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 tentang
Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber
Tanah Objek Reforma Agraria

Surat Keputusan Menteri LHK No. 22/MenLHK/Setjen/PLA.0/1/2017 tentang
Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)

Peraturan Menteri LHK P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan
Sosial

Peraturan Menteri LHK P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan
Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani Peraturan Menteri LHK
P.32/Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Hutan Hak

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan
Umum, dan Kepala BPN—No. 79 Tahun 2014, P.B 3/Menhut-
II/2014, 17/PRT/M/2014, dan 8/SKB/X/2014—(Perber 4 Menteri)
tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di
Dalam Kawasan Hutan

Peraturan Menteri LHK P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Tata Cara
Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan
untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria

Peraturan Menteri LHK P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Tata Cara
Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan
untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria

Peraturan Menteri LHK P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat
dan Hutan Hak

Surat Keputusan Menteri LHK 312/MenLHK/Setjen/PSKL.1/4/2019 tentang Peta
Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat

Surat Edaran Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung No.
114/PDASHL/KPHL/DAS-3/9/2018 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Budidaya Kopi di Hutan Lindung

Putusan MK No. 32/PUU-VIII/2010 terkait uji permohonan materiil UU No. 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Putusan MK Perkara No. 21-22/PUU-V/2007 terkait uji permohonan materiil UU
No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Putusan MK Perkara No. 3/PUU-VIII/2010 terkait permohonan uji materiil UU
No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil

Putusan MK No. 85/PUU-XII/2013 terkait permohonan uji materiil UU No. 7
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 terkait permohonan uji materiil UU No. 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan

Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 terkait permohonan uji materiil UU No. 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 terkait permohonan uji materiil UU No. 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan

Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 terkait permohonan uji materiil UU No. 41
tentang Kehutanan dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan
Pemberantasan Pembalakan Hutan

Putusan PN Palembang No.1150/Pid.Sus/2014/PN.Plg;
1149/Pid.Sus/2014/PN.Plg; 1148/Pid.Sus/2014/PN.Plg;
1160/Pid.Sus/2014/PN.Plg; 1159/Pid.Sus/2014/PN.Plg; dan
1158/Pid.Sus/2014/PN.Plg terkait perkara kriminalisasi petani
(anggota marga) di kawasan hutan Suaka Margasatwa Dangku,
Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

Putusan PN Kendal No.29/Pid.Sus/2016/PN.Kdl *juncto* Putusan PT Semarang
Perkara No.43/Pid.Sus/2017/PT.Smg terkait perkara kriminalisasi
petani hutan yang dituduh kawasan hutan (hasil tukar-menukar
dengan lahan non-kawasan) tanpa izin di Desa Surokonto Wetan,
Kendal, Jawa Tengah

Putusan PN Blora No.288/Pid.Sus/2017/PN.Bla *juncto* Putusan PT Semarang
Perkara No.102/Pid.Sus/2018/PT.Smg terkait perkara kriminalisasi
petani hutan yang memasuki kawasan hutan (Perum Perhutani) dan
mengambil ranting tanpa izin di Desa Temulus, Kabupaten Blora,
Jawa Tengah

Putusan MA No. 56/P/HUM/2017 terkait permohonan uji materiil
P.39/Menlhk/Setjen/Kum.I/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di
Wilayah Kerja Perum Perhutani